

TESIS

**KEBIJAKAN KRIMINAL (*CRIMINAL POLICY*) DAN
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMALSUAN
IJAZAH PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH
*CRIMINAL POLICY AND LEGAL ACCOUNTABILITY FOR CRIMINAL
ACTS OF FORGERY OF PRIMARY AND SECONDARY EDUCATION
CERTIFICATES***



Oleh:

TULUS MAMPETUA LUMBAN GAOL

NIM. 2310622011

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
JAKARTA
2025**

TESIS

**KEBIJAKAN KRIMINAL (*CRIMINAL POLICY*) DAN
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TINDAK PIDANA
PEMALSUAN IJAZAH PENDIDIKAN DASAR DAN
PENDIDIKAN MENENGAH**

***CRIMINAL POLICY AND LEGAL ACCOUNTABILITY FOR
CRIMINAL ACTS OF FORGERY OF PRIMARY AND
SECONDARY EDUCATION CERTIFICATES***



Oleh:

TULUS MAMPETUA LUMBAN GAOL

NIM. 2310622011

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
JAKARTA
2025**

HALAMAN JUDUL

**KEBIJAKAN KRIMINAL (*CRIMINAL POLICY*) DAN
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TINDAK PIDANA
PEMALSUAN IJAZAH PENDIDIKAN DASAR DAN
PENDIDIKAN MENENGAH**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Hukum Program Magister

Disusun dan diajukan oleh:
TULUS MAMPETUA LUMBAN GAOL
NIM. 2310622011

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
JAKARTA
2025**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

KEBIJAKAN KRIMINAL (*CRIMINAL POLICY*) DAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMALSUAN IJAZAH PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH

Disusun dan diajukan oleh:

TULUS MAMPETUA LUMBAN GAOL

NIM. 2310622011

Disetujui untuk Tahap UJIAN TESIS

Pada Tanggal.....

Menyetujui:

Pembimbing 1



Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, S.H.,
M.H., M. Tr.Adm.Kes.
NIP. 199304282022031009

Pembimbing 2



Dr. Ahmad Ahsin Thohari, S.H., M.H.
NIP. 197308042006041001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM
Jalan Rumah Sakit Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450
Telepon 021-7656971 , Fax 021-7656904
Laman : hukum.upnvj.ac.id , e-mail: fh@upnvj.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

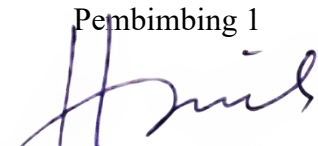
KEBIJAKAN KRIMINAL (*CRIMINAL POLICY*) DAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMALSUAN IJAZAH PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH

Disusun dan diajukan oleh:
TULUS MAMPETUA LUMBAN GAOL
NIM. 2310622011

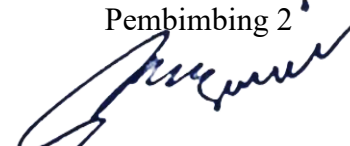
Telah diujikan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
Pada Tanggal 30 Juni 2025
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat Kelulusan

Menyetujui:

Pembimbing 1


Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, S.H.,
M.H., M. Tr.Adm.Kes.
NIP. 199304282022031009

Pembimbing 2


Dr. Ahmad Ahsin Thohari, S.H., M.H.
NIP. 197308042006041001

Koordinator Program Studi Hukum
Program Magister


Dr. Atik Winanti, S.H., M.H.
NIKD. 196806081994032001

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Subhman, S.H., LL.M.
NIP. 197006022021211004

Ditetapkan : Jakarta
Tanggal Ujian : 30 Juni 2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Tulus Mampetua Lumban Gaol

NIM : 2310622011

Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Tesis yang Berjudul **KEBIJAKAN KRIMINAL (CRIMINAL POLICY) DAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMALSUAN IJAZAH PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, Maret 2025

Yang membuat pernyataan



Tulus Mampetua Lumban Gaol
NIM. 2310622011

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tulus Mampetua Lumban Gaol

NIM : 2310622011

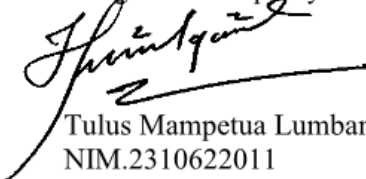
Program Studi : Magister Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-exclusive Royalti Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“KEBIJAKAN KRIMINAL (CRIMINAL POLICY) DAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMALSUAN IJAZAH PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH”** beserta perangkat yang ada. Dengan Hak Bebas Royalti ini, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, Mei 2025

Yang membuat pernyataan



Tulus Mampetua Lumban Gaol
NIM.2310622011

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, Penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Penelitian ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan karya akhir ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Anter Venus, MA.Comm, Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta beserta para Wakil Rektor.
2. Dr. Suherman S.H., LL.M, Dekan Fakultas Hukum sekaligus Pembimbing yang telah memberikan masukan dan sumbangan pemikiran pada saat menyusun penulisan tesis ini.
3. Dr. Atik Winanti, S.H., M.H, selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
4. Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, S.H., M.H., M.Tr.Adm.Kes. selaku Pembimbing Pertama dan Dr. Ahmad Ahsin Thohari, S.H., M.H. selaku Pembimbing Kedua, yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan, berdiskusi, dan memberikan masukan kepada penulis dalam penyusunan penelitian ini.
5. Dr. Handoyo Prasetyo, S.H., M.H dan Dr. Irwan Triadi, S.H., M.H selaku Dosen Penguji yang telah memberikan saran dan berbagi ilmu demi sempurnanya penyusunan penelitian ini.
6. Seluruh Dosen Program Studi Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan selama berkuliah di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
7. Bapak Dirjen PAUD Dasmen, Sesditjen PAUD Dasmen, Kepala Bagian Umum, dan Keuangan, Kepala Sub Tim Kerja Sama dan SPK, Ibu Sopha

Julia dan seluruh staf, terima kasih atas seluruh bantuan dan permaklumannya selama penulis mengikuti masa perkuliahan.

8. Kedua Orang Tua Penulis yaitu Bapak Sahata Lumban Gaol B.A, (+) dan Ibu Lumida Simamora (+), saya yakin kalian tersenyum dan bangga dari Surga melihat capaian anak siampudanmu ini (^_ ^).
9. Bapak dan Ibu mertuaku yaitu Marihot Hutapea (+), dan Ibu A.A. Marialam Tampubolon, terima kasih telah mendidik dan membesarkan putri yang begitu baik dan tangguh yang menjadi Istri dan Ibu dari anak anaku.
10. Terkhusus Istriku terkasih yang sedang mengandung anak ke 3 kita, Anita Veronica Hutapea, S.H, tiada kesulitan yang sanggup menghalangi ketika Ibu negara sudah turut serta, keyakinan, penyertaan, dan semangatmu selalu memberikan tenaga ekstra dalam menyelesaikan setiap tantangan khususnya perkuliahan ini, tetaplah perhatian dan yakin akan kita.
11. Kedua anaku Rafael J.P Lumban Gaol, dan Gabriel A.B Lumban Gaol, tetaplah baik budi dan menjadi anak yang berguna bagi keluarga, bangsa, terlebih bagi Tuhan, dan ingatlah ini agar dikemudian hari menjadi pemacu mengejar jenjang yang lebih tinggi lagi.
12. Seluruh abang, kakak, dan adikku yaitu Marganda Lumban Gaol, Batara Lumban Gaol, Aruslin Lumban Gaol, Pasu Lumban Gaol, Lastiur Lumban Gaol, Togu Lumban Gaol, dan Natalina Lumban Gaol, terima kasih untuk seluruh kasih dan dukungan kalian.
13. Teman-teman kuliah dan rekan-rekan kerja penulis, yang telah membantu dalam penyelesaian penelitian ini.
14. Seluruh staff akademik Program Studi Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta yang selalu sigap dalam membantu administrasi perkuliahan.
15. Dan seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penelitian ini, Penulis menghaturkan banyak terima kasih atas segala bantuannya.

Akhir kata seperti peribahasa yang menyatakan tiada gading yang tidak retak, Penulis menyadari bahwa penulisan Tesis ini masih jauh dari kata sempurna, serta

tidak lepas dari kesalahan dan kekurangan, baik secara penulisan maupun segi materi. Oleh karena itu Penulis mengharapkan kritik dan saran terhadap segala kekurangan demi penyempurnaan lebih lanjut. Semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat bagi penulis secara khusus dan bagi semua pihak yang membutuhkan secara umum, kiranya Tuhan selalu menemani dan mengiringi setiap langkah dalam kehidupan kita, terima kasih.

Jakarta, Mei 2025

Penulis

Tulus Mampetua Lumban Gaol

ABSTRAK

KEBIJAKAN KRIMINAL (CRIMINAL POLICY) DAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMALSUAN IJAZAH PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH

Tulus Mampetua Lumban Gaol (2310622011), Handar Subhandi Bakhtiar, Ahmad

Ahsin Thohari

Pemalsuan ijazah telah menjadi masalah serius yang berdampak luas, baik bagi individu yang terlibat langsung maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Dampak dari tindakan ini sangat merugikan, antara lain mengganggu integritas sistem pendidikan, merusak reputasi lembaga pendidikan, dan menciptakan ketidakadilan dalam dunia kerja dan pendidikan. Fenomena ini tidak hanya melibatkan pelaku perseorangan, tetapi juga melibatkan organisasi/penyelenggara pendidikan yang secara sadar menerbitkan atau memfasilitasi dokumen palsu tanpa dasar hukum yang sah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan kriminal serta pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, baik oleh individu maupun organisasi/ penyelenggara pendidikan, serta menelaah disparitas antara norma hukum yang ideal (*das Sollen*) dengan implementasinya dalam praktik (*das Sein*). Metode penelitian hukum yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif dengan melakukan penelitian pada bahan pustaka dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana pemalsuan dokumen khususnya ijazah telah tersedia dan memadai, akan tetapi terdapat ketimpangan yang signifikan antara norma hukum dengan praktik penegakan hukum dalam kasus pemalsuan ijazah dimana penegak hukum lebih cenderung menyalah pelaku secara individu dan melepaskan organisasi/ penyelenggara pendidikan dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan, khususnya pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Kata Kunci: Kebijakan Kriminal; Pertanggungjawaban Hukum; Pemalsuan; Ijazah.

ABSTRACT

CRIMINAL POLICY AND LEGAL ACCOUNTABILITY FOR CRIMINAL ACTS OF FORGERY OF PRIMARY AND SECONDARY EDUCATION CERTIFICATES

Tulus Mampetua Lumban Gaol (2310622011), Handar Subhandi Bakhtiar, Ahmad

Ahsin Thohari

Diploma forgery has emerged as a serious and widespread issue, adversely affecting both individuals directly involved and the broader society. The consequences of such acts are significantly harmful, including the undermining of the integrity of the educational system, the tarnishing of the reputation of educational institutions, and the creation of inequality and injustice in both educational and employment sectors. This phenomenon involves not only individual offenders, but also organization/educational institutions that knowingly issue or facilitate forged diplomas without any legitimate legal basis. This study aims to analyze criminal policy and legal accountability concerning perpetrators of diploma forgery at the primary and secondary education levels, whether committed by individuals or by educational organizations/providers. It also seeks to examine the disparity between the ideal legal norms (das Sollen) and the actual implementation of law (das Sein). The research applies a normative juridical legal method, based on literature review and employing a statutory approach. The findings of this study conclude that the existing legal framework governing the criminal act of document forgery, particularly in relation to diplomas, is available and adequate. However, there exists a significant discrepancy between the legal norms and their enforcement in practice. Law enforcement authorities tend to focus predominantly on individual perpetrators, while educational organizations or institutions that play a central role in facilitating such forgeries are often excluded from criminal liability, despite the existence of clear legal provisions regulating such conduct—particularly within the context of primary and secondary education.

Keywords: Criminal Policy; Legal Accountability; Forgery; Diploma.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL TESIS.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Orisinalitas Penelitian.....	8
BAB II	11
TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Kajian Teoritis.....	11
1. Teori Kebijakan Kriminal	11
2. Teori Kebijakan Kriminal	15
B. Kerangka Pikir	18
C. Definisi Operasional.....	21
BAB III.....	22
METODE PENELITIAN	22
A. Jenis Penelitian	22
B. Pendekatan Penelitian	22
C. Tipe Penelitian.....	23

D. Sifat Penelitian.....	23
E. Metode Pengumpulan Data.....	23
F. Sumber Bahan Hukum.....	23
G. Teknik Analisis.....	24
BAB IV	25
HASIL DAN PEMBAHASAN	25
A. Kebijakan Kriminal Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah Di Indonesia 25	
1. Ijazah Sebagai Bentuk Pengakuan Negara Atas Pencapaian Bidang Pendidikan dalam Hukum Pidana Indonesia	29
2. Politik Hukum Pidana di Indonesia.....	32
3. Ijazah Sebagai Bentuk Pengakuan Negara Atas Pencapaian Bidang Pendidikan dalam Hukum Pidana Indonesia	40
4. Penerbitan Ijazah Nasional Yang Berbasis Elektronik.....	45
B. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perseorangan, Organisasi atau Penyelenggara Pendidikan Dalam Penerbitan Ijazah Palsu Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	51
1. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perseorangan Dalam Penerbitan Ijazah Palsu Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	57
2. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Organisasi atau Penyelenggara Pendidikan Dalam Penerbitan Ijazah Palsu Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	61
3. Disparitas <i>Das Sollen</i> dan <i>Das Sein</i> dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan ijazah Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	64
BAB V.....	68
PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA.....	70